

POLA KONFLIK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DAN RELASI KONFLIKNYA DENGAN NEGARA DI ERA ORDE BARU DAN REFORMASI



Suswanto¹

Abstract: *This article is written to explain conflict pattern that faced by Partai Persatuan Pembangunan (PPP) in the New Order Era and Reformation Era. The article is not only explain PPP's conflict pattern but also explore relation between conflict and state. In New Order Era, The political parties unification policy made internal conflict at political party. PPP was one of political parties that tasting of internal conflict in New Order Era. After New Order Era collapse, PPP still faced internal conflict. Some officials came out from PPP, then they established new political party.*

Kata-kata kunci: *Konflik, PPP, Orde baru, Reformasi*

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang ada. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis ini menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan data-data yang terkumpul sehingga didapatkan kesimpulan dan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dan persamaan pola konflik PPP di era orde baru dan reformasi. Perbedaannya, pola konflik PPP di era orde baru lebih disebabkan karena perseteruan antar fraksi dalam memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan, terutama antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muslimin Indonesia (MI). Intervensi negara dalam konflik PPP di era orde baru sangat besar. Beberapa langkah intervensi dilakukan baik secara langsung maupun tidak, mulai dari melakukan penyederhanaan partai, penerapan asas tunggal Pancasila, kebijakan Floating mass dan melalui operasi intelijen dengan menempatkan orang yang bisa diajak kerjasama dengan pemerintah serta menyingkirkan pemimpin partai yang dianggap radikal atau kritis terhadap pemerintah. Sementara di era reformasi konflik PPP bukan antar fraksi tetapi antar pribadi yang disebabkan karena ego dan kepentingan untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak ada intervensi negara dalam konflik tersebut karena negara di era reformasi sedang mengalami delegitimasi. Persamaannya, sifat konflik sama-sama tidak prinsipil. PPP juga terlihat belum mempunyai mekanisme penyelesaian konflik secara efektif.

Berkaitan dengan seringnya konflik, PPP perlu melakukan pelembagaan demokrasi prosedural dan peningkatan penghayatan tentang ideologi partai sebagai bagian dari

¹ Dosen Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY

ruhpertuanagn politik. Termasuk didalamnya mengatur bagaimana mekenisme penyelesaian konflik baik internal maupun eksternal secara efektif. Berkaitan dengan turunnya kepercayaan rakyat terhadap partai sebagaimana terlihat dalam pemilu legislatif dan presiden 2004, PPP perlu konsisten dan sungguh-sungguh menjalankan fungsi-fungsinya sebagai partai politik, seperti komunikasi polotok, pendidikan politikk, rekrutmen politik, agregrasi dan artikulasi kepentingan rakyat serta aktif membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami rakyat.

PENDAHULUAN

Merosotnya perolehan suarapartai persatuan pembangunan (selanjutnya disingkat PPP) dalam pemilu legislatif dan minimnya suara pasangan hamzah Haz dan Agum Gumelar dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 menunjukkan betapa terpuruknya PPP. Dalam pemilu legislatif, suara ppp mengalami penurunan drastis, dari 25 juta suara pada pemilu 1999 menjadi 10 juta suara pada pemilu 2004. Hasil pemilihan presiden lebih menyedihkan lagi, kareana pasangan Hambah-Agum yang diusung PPP hanya mendapatkan suara 3,1%. Hasil pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2004 secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1
Hasil pemilu legislatif dan Pilpres 2004

Preerensi pemilih	Wiranto-Wahid (Golkar-PKB)	Mega-hasyim (PDI-P)	Amien- Siswono (PAN)	SBY-JK (PD)	Hamzah- Agum (PPP)
Hasil pemilu legislatif (%)	21,58+10,57	18,53	6,44	7,45	8,15
Hasil Pilpres (%)	23,3	26,0	14,4	33,2	3,1

Ironis, partai Islam yang telah banyak makan garam dalam perpolitikan nasional dan pernah menjadi satu-satunya wadah penampung aspirasi politik umat Islam, harus kehilangan kepercayaan dari hampir seluruh elemen umat Islam. Tidak bisa dipungkiri, bahwa merosotnya kepercayaan rakyat terhadap PPP tentu berkaitan dengan fenomena konflik yang terus-menerus menerpa partai ini. konflikPPP ternyata tidak hanya terjadi di era orde baru, tetapi juga di era reformasi. Identitas konflik PPP di era reformasi justru semakin meningkat. Pemberhentian 6 (enam) pengurus pusat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP karena melakukan sesuatu yang dianggap menyelahi kebijakan partai. Keluarnya KH Zaenuddin MZ dan Ja'far Badjeber yang kemudian membentuk Partai Bintang Reformasi (PBR), pengunduran diri Bachtiar Chomsyah dan m Husni tamrin dari keanggotaan formatur muktamar V PPP 2003 serta pemecatan ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Fauzi AR adalah sebagai bukti dari adanya konflik dalam tubuh PPP di era reformasi.

Kajian mengenai konflik PPP di era orde baru seringkali menempatkan negara

sebagai dalangnya. Hasil kajian tersebut tidak sepenuhnya salah, karena negara di era orde baru memang berkepentingan agar partai politik senantiasa dibawah kontrol negara. Dalam rezim orde baru partai dianggap sebagai sumber konflik dan sumber ketidakstabilan politik sebagaimana pernah terjadi di orde lama. Orde lama adalah masa lalu yang buruk sehingga tidak boleh terulang lagi. Untuk menjamin kestabilan politik maka rezim orde baru melakukan penyederhanaan partai, penetapan pancasila sebagai satu-satunya asas partai dan pembatasan bagi politisi partai untuk duduk dalam birokrasi. Rezim orde baru berkepentingan agar partai senantiasa kooperatif terhadap pemerintah dan menjadi partner pemerintah dalam modernisasi, khususnya pembedaan ekonomi. Partai politik diharapkan dapat menjadi modal dasar pembangunan dan instrumen negara sehingga mudah dikendalikan.

Oleh rezim orde baru, PPP dianggap berpotensi menjadi partai yang akan mengembangkan ideologi Islam. Potensi tersebut tidak boleh muncul karena tidak sejalan dengan ideologi pembangunan yang tetapkan rezim ordebaru. Dengan demikian PPP harus dijinakkan. Upaya-upaya orde baru yang paling kentara untuk mengurangi peran partai politik yakni PPP dan PDI adalah memecah belah para pemimpin partai melalui operasi intelijen (William Liddi, 1987). Orde baru berkepentingan melemahkan PPP dan PDI untuk memperkuat Golkar.

Asumsi bahwa PPP konflik karena adanya intervensi negara mungkin benar dalam konteks politik Orde Baru. Tetapi bagaimana menjelaskan konflik PPP di era reformasi? mengapa PPP masih dilanda konflik bahkan intensitas konflik yang tinggi ketika peran dan posisi negara sangat lemah secara politik? Dalam kondisi seperti itu apakah masih relevan menjadikan negara sebagai faktor utama penyebab konflik PPP? Seharusnya dengan pengalaman politik dan potensi yang dimilikinya, PPP berpeluang menjadi partai politik Islam modern terbesar di Indonesia. Sebagai partai politik Islam paling senior di antara partai politik Islam lain di era reformasi dan kenyang dengan pengalaman konflik, seharusnya membuat PPP mampu menyelesaikan konflik yang dialaminya dengan cara yang lebih elegan. Terlebih lagi, negara di era reformasi menganut sistem politik dan kepartaian yang realtif terbuka sehingga membuat partai termasuk PPP dapat menjadi mandiri secara politik.

Bertolak dari penjelasan di atas menjadi penting dan menarik untuk dikaji bagaimana pola konflik PPP dan relasi konfliknya dengan negara di era orde baru dan reformasi? Kajian tentang konflik PPP di era orde baru memang sudah banyak dilakukan. Akan tetapi kajian mengenai pola konflik PPP dan relasi konfliknya dengan negara di era orde baru belum dilakukan. Pola konflik mencakup bentuk materi, pihak yang terlibat, sumber, sifat, implikasi dan cara penyelesaian konfliknya. Realasi konflik dengan negara dilihat dari bagaimana dan sejauhmana pengaruh atau campur tangan negara dalam konflik tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pola konflik PPP di era orde baru dan reformasi? Bagaimana relasi konflik PPP dengan negara di era orde baru dan reformasi?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana pola konflik PPP di era orde baru dan reformasi serta bagaimana relasi konfliknya dengan negara. Penelitian ini juga bertujuan melakukan komparasi tentang pola konflik PPP dan realasi konfliknya dengan negara di era orde baru dan reformasi. Dengan melakukan komparasi, dapat diketahui persamaan dan perbedaannya. Hasil penelitian dapat menjadi acuan perumusan secara teoritik tentang pola konflik partai Islam dan realasi konfliknya dengan negara yang menerapkan sistem politik, pemilu dan kepartaian yang berbeda.

KERANGKA DASAR TEORI

Konsep atau teori yang akan dijelaskan dalam bagian ini adalah tentang pola, konflik, partai politik dan sistem kepartaian.

Konsep tentang pola

Secara umum pola dipahami sebagai bentuk atau gambaran tentang suatu hal yang khas dan berguna sebagai contoh atau model atas hal-hal yang telah diketahui sebelumnya. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pola adalah sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap (Afdal Zikri, 2005). Sedangkan dalam kamus politik, pola adalah sistem, cara kerja, bentuk (struktur) yang tetap, corak atau rencana (Marbun, 1996)

Konflik: pengertian, Faktor Penyebab, Tipe, Akibat dan Solusi

Secara umum konflik didefinisikan sebagai suatu perjuangan yang diekspresikan antara sekurang-kurangnya dua pihak yang saling bergantung yang mempunyai persepsi tentang tujuan-tujuan yang tidak sepadan, imbalance yang langka dan gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. Konsep konflik biasanya mengacu kepada perbedaan dan pertentangan kepentingan, pendapat, ide atau paham baik dalam bentuk kekerasan maupun dalam kadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (Albert F. Eldridge, 1979). Pertentangan dapat dikategorikan konflik jika memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Dalam konteks ini, RW Maeck, R. C. Synder dan Robert Ted Gurr sebagaimana dikutip Dennis C. Pirages membuat kriteria sebagai berikut: pertama, sebuah konflik harus melibatkan dua pihak atau lebih. Kedua, pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi saling memusuhi (*mutually opposing action*). Ketiga, mereka cenderung melakukan perilaku koersif untuk menghadapi dan menghancurkan orang atau kelompok yang dianggap sebagai musuh. Keempat, interaksi pertentangan diantara pihak-pihak tersebut berada dalam keadaan tegas dan oleh karena itu keberadaan pertentangan tersebut dideteksi dengan mudah oleh pengamat yang tidak terlihat didalamnya (Dennis C. Pirages, 1982).

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sebab musabab atau akar konflik dapat berasal dari beberapa hal, yaitu pertama, perbedaan pendirian dan perasaan antar individu. Kedua, perbedaan kepribadian individu sebagai pengaruh dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan dan perkembangan kepribadian individu tersebut. Ketiga, perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok. Keempat, perubahan sosial yang berlangsung cepat (Soerjono Sukanto, 1995)

Konflik sebagai perbedaan dan pertentangan dapat bersumber dari suatu sikap yang berbeda antara seseorang atau sekelompok orang dengan seseorang atau sekelompok orang yang lain dalam suatu ikatan tatkala mereka bersama-sama. Menurut March dan Synder, perpecahan atau konflik dapat timbul dari kelangkaan posisi atau sumber-sumber (*resources*). Semakin sedikit posisi atau sumber yang diraih setiap anggota atau kelompok dalam organisasi, semakin tajam pula konflik persaingan di antara mereka untuk merebut posisi dan sumber tersebut. Sementara itu David Schwartz mengatakan bahwa konflik dapat juga disebabkan oleh aliansi politik. Menurut Schwartz, aliansi politik dialami seseorang atau sekelompok orang ketika menyadari bahwa nilai-nilai yang dianut sistem politik maupun pemerintah berbeda dan bertentangan dengan nilai-nilai politik mereka (David Schwartz, 1978).

Sumber konflik lain yang dapat berkembang dalam sebuah organisasi termasuk partai politik adalah ideologi politik. Menurut Maurice Duverger, ideologi politik dalam arti ideologi yang berhubungan dengan kekuasaan dan pelaksanaannya dapat menyatukan komunitas sekaligus menjadi sumber antagonisme atau konflik (Maurice Duverger, 1982). Selain ketiga faktor internal tersebut, konflik dalam tubuh partai dapat juga disebabkan karena faktor eksternal, seperti intervensi pihak ketiga. Menurut Dennis Pirages intervensi pihak ketiga tidak banyak membantu menyelesaikan konflik yang terjadi (Dennis Pirages, 1982).

Dilihat dari sifatnya, type konflik dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama, konflik yang sama sekali tidak memiliki dasar yang prinsipil. Kedua, konflik yang timbul karena adanya perbedaan mengenai bagian-bagian dari suatu prinsip, tetapi bukan mengenai prinsip itu sendiri. Ketiga, konflik yang bertolak dari suatu prinsip dasar (Maurice Duverger, 1963). Soerjono Soekanto berpendapat bahwa konflik dapat mengakibatkan beberapa hal, yaitu: pertama, bertambahnya solidaritas in-group, jika yang terjadi adalah konflik antar kelompok. Kedua, retak atau goyahnya persatuan kelompok tersebut, jika konflik terjadi dalam satu kelompok. Ketiga, perubahan kepribadian individu yang terlibat konflik. Keempat, kerugian harta benda dan jatuhnya korban jiwa. Kelima, terjadinya politik akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak (Soerjono Soekanto, 1995).

Pengaturan konflik antar partai dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: pertama, dengan koalisi pemerintahan yang stabil diantara partai-partai politik. Kedua, menerapkan prinsip proporsionalitas. Ketiga, menerapkan sistem saling veto, yaitu keputusan politik tidak akan diputuskan tanpa disetujui oleh semua partai politik yang terlibat konflik (Soerjono Soekanto, 1995).

Studi mengenai konflik PPP di era orde baru yang dilakukan Syamsudin Haris, Djuanda dan Acung Marijan menyimpulkan bahwa konflik PPP bersifat internal dan eksternal. Konflik internal adalah konflik yang disebabkan faktor internal yaitu terbatasnya posisi dan sumber-sumber, aliens politik dan perbedaan (penafsiran) ideologi politik partai. Sedangkan konflik eksternal adalah konflik yang disebabkan oleh faktor liar yaitu intervensi negara. Berdasarkan hasil kajian mereka juga dapat disimpulkan bahwa konflik PPP di era orde baru berkisar di antara tipe pertama dan kedua dalam perspektif Maurice Duverger.

Partai Politik dan Sistem Kepartaian

Menurut Carl J Friederich, partai politik adalah sekelompok manusia yang berorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan kekuasaan itu, partai memberikan kepada anggotanya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material (Miriam Budiardjo, 1998). Ada tiga teori yang dapat digunakan untuk melihat asal usul partai yaitu teori kelembagaan, situasi historik dan pembangunan. Teori kelembagaan melihat ada hubungan antara parlemen awal dengan timbulnya partai politik. Adapun teori situasi historik melihat adanya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis. Sedangkan teori pembangunan melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Modernisasi melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi dalam proses tersebut.

Sebagaimana organisasi lain, partai politik juga memiliki beberapa fungsi yaitu rekrutmen politik, artikulasi kepentingan, komunikasi politik, sosialisasi politik dan pengatur politik (Miriam Budiardjo, 1998). Partai politik dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Ramlan Surbakti membedakan partai politik berdasarkan asa dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota serta basis sosial dan tujuannya (Ramlan Surbakti, 1982). Berdasarkan asas dan orientasinya partai politik dapat dibedakan menjadi partai pragmatis, doktriner dan kepentingan. Adapun berdasarkan komposisi dan fungsi anggota, partai politik dibagi menjadi partai kader, massa, ptoero, dictatorial dan catch-all. Ada empat type partai jika dilihat dari basis sosialnya, yaitu pertama, partai yang beranggotakan berbagai lapisan sosial dalam masyarakat. Kedua, partai yang anggotanya dari kalangan tertentu. Ketiga, partai yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu. Keempat, partai bangsa, bahasa dan daerah tertentu. Pembagian partai menjadi partai perwakilan kelompok, pembina bangsa dan mobilisasi adalah pembagian partai berdasarkan tujuannya. Dilihat dari basis sosialnya PPP dapat dikategorikan sebagai partai Islam. Kriteria partai Islam adalah partai yang mencantumkan Islam sebagai asasnya, menggunakan simbol-simbol Islam dan basis sosialnya berasal dari kalangan Islam tertentu.

Berkaitan dengan sistem kepartaian, Maurice Duverger, GA Jacobsen dan MH Lipman mengklasifikasikan sistem kepartaian dalam tiga jenis yaitu sistem partai tunggal, dua partai dan multi partai. Pembagian sistem kepartaian yang hanya didasarkan pada tipologi numerik dianggap tradisional dan tidak mampu menggambarkan interaksi yang terjadi diantara partai-partai yang ada. Berkaitan dengan itu, Giovanni Sartori, mengatakan bahwa pembagian partai bukanlah masalah jumlah partai, melainkan jarak ideologi antar partai-partai yang ada. Dengan kata lain klasifikasi sistem kepartaian didasarkan atas jumlah kutub (polar), jarak diantara kutub-kutub tersebut (polaritas) dan arah perilaku politiknya. Berdasarkan hal itu Sartori membagi sistem kepartaian menjadi sistem pluralisme sederhana, pluralisme moderat dan pluralisme ekstrim (Ramlan Surbakti, 1982) gsmbsrsn skematik klasifikasi sistem kepartaian Sartori dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.2.
Sistem Kepartaian Sartori

Sistem kepartaian	Kutub	Polaritas	Arah
Pluralisme Sederhana	Bipolar	Tidak ada	Sentripetal
Pluralisme Moderat	Bipolar	Kecil	Sentripetal
Pluralisme ekstrim	Multipolar	Besar	Sentrifugal

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang ada. Data yang dibutuhkan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber pertama atau pihak yang terlibat dalam konflik PPP. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari sumber tidak langsung bisa dari majalah, koran, buku atau orang yang tidak terlibat dalam konflik PPP. Unit analisis penelitian ini adalah pengurus

DPP PPP dan DPW PPP DIY di era orde baru dan reormasi serta pengurus DPP PBR dan DPW PBR DIY di era reformasi.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara adalah teknik untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dengan sumber primer yaitu pengurus DPP PPP dan DPW PPP DIY di era orde baru dan reformasi serta pengurus DPP PBR dan DPW PBR DIY di era reformasi. Sedangkan teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sumber sekunder, yakni majalah, buku, jurnal, tabloid, web site atau informasi lainnya secara tertulis.

Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Proses analisis kualitatif diawali dengan mengumpulkan data dari data wawancara dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data proses selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan data untuk kemudian diklasifikasikan. Data yang sudah diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Analisis didasarkan pada interpretasi dan kerangka teori yang digunakan. Analisis menghasilkan deskripsi secara utuh mengenai pola konflik PPP dan relasi konflik dengan negara di era orde baru dan reformasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola konflik PPP dan Relasi konfliknya dengan negara di era orde baru

Salah satu fenomena politik menarik dalam sejarah orde baru adalah konflik partai khususnya PPP. Begitu seringnya konflik sehingga agak sulit memahami dinamika politik PPP di era orde baru tanpa menyertakan perspektif konflik yang dialaminya. Begitu juga, problem PPP di era orde baru tidak mungkin bisa dipahami tanpa menghubungkannya dengan arah penataan politik Orde Baru.

Pengalaman traumatik terhadap partai politik pada masa Orde lama dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas demi kelangsungan pembangunan ekonomi membuat pemerintah orde baru yang relatif dikuasai militer, menempatkan partai politik pada posisi yang tidak menguntungkan. Dalam pandangan militer partai politik bukan hanya pernah mencampuri urusan mereka, sebagaimana dalam peristiwa 17 Oktober 1952 (Deliar Noer, 1987), tetapi juga oknum pimpinan partai politik juga pernah dianggap melawan mereka sebagaimana terjadi dalam pemberontakan pemerintahan revolusioner republik Indonesia (PRRI)/Permesta (Suswanta, 2000). Pemerintahan orde baru beranggapan bahwa jumlah partai politik berikut jumlah ideologi yang dibawanya identik dengan jumlah konflik dan ketidakstabilan politik yang dihasilkan.

1. Konsekuensi Politik Dari Fusi Separuh Badan

Problem awal yang dialami PPP yang nantinya berimplikasi pada konflik partai adalah berkaitan dengan proses kelahirannya yang bukan atas kehendak umat Islam melainkan atas kehendak penguasa. Jikapada orde lama partai-partai politik muncul dan lahir atas prakarsa masyarakat sepenuhnya, maka kelahirannya jabang bayi PPP adalah rekayasa pemerintah. Berkaitan masalah fusi partai, faisal Baasir (mantan Ketua

DPP PPP, mantan ketua umum Permusi dan mantan Ketua Komisi IX DPR RI) dan Chosyin Chumaedy (fungsionaris PPP dari tahun 1977-2005 dan wakil sekretaris umum DPP PPP) mengatakan:

"... sebenarnya bergabungnya partai-partai Islam itu bukan keinginan internal, tetapi merupakan rekayasa pemerintah untuk mempermudah mengendalikannya, karena pemerintah menilai kekuatan partai terfetak pada pemimpinnya" (Faisal Baasir, 2006)

"... seperti kita ketahui bahwa PPP itu terbentuk dari partai-partai berbasis Islam. Fusi itu sebenarnya terjadi karena ada kehendak politik untuk menyederhanakan jumlah partai. Jadi semacam rekayasa politik dari pemerintah" (Chosyin Chumaedy, 2006).

Menurut Faisal Baasir, akibat dari fusi yang dipaksakan, masih ada kebanggaan historikal dari unsur-unsur pembentuk PPP, yang kemudian menimbulkan kepentingan pribadi dan kelompok dengan mekanisme aliran. Akibat lebih jauh, terjadi persaingan antar unsur di internal partai. Satu unsur ingin mendominasi unsur lainnya dan akhirnya saling menjatuhkan (Faisal Baasir, 2006)

Masih terdapatnya asas agamadan sifat federatif keempat unsur PPP, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Pergerakan tarbiah Islam (Perti), yang masing-masing berdasarkan Islam telah membawa persoalan rumit pada PPP. Hal ini disebabkan karena asas agama dalam suatu partai politik sedikit banyak mencerminkan sistem kemasyarakatan yang masih terikat pada apa yang disebut Smith sebagai tradisional religipolitical system (Fachri Ali, 1985). Dalam masyarakat semacam ini, komponene ideologi masyarakat secara keseluruhan ditarik dari agama dimana tidak boleh ada ideologi sekuler. selanjutnya agama berfungsi memberi legitimasi terhadap tindakan-tindakan politik dan bentuk-bentuk kekuasaan dalam masyarakat. Dengan sendirinya, masyarakat politik (polity) identik dengan masyarakat agama (religion community). Konsekuensinya peran kaum agamawan sangat dominan, bukan hanya dalam kehidupan sosio kultural tetapi juga dalam kehidupan politik. Dengan kata lain peran dan perilaku politik elit agama sangat menentukan eksistensi partai.

Melihat unsur-unsur PPP yang pada dasarnya merupakan organisasi massa dan berakar pada masyarakat tertentu dengan landasan keagamaan yang sama sekaligus berfungsi sebagai ideologinya, maka dalam kategori Geertz, PPP termasuk dalam kelompok partai aliran (Fachri Ali, 1985). Dengan demikian dilihat dari asas dan unsurnya, PPP merupakan suatu partai politik yang bersifat keagamaan, dalam hal ini Islam sekaligus bersifat aliran. Perbedaan latar belakang sejarah dan kultur serta aliran (paham) keagamaan dari masing-masing unsur partai telah memberi andil yang cukup besar bagi terbentuknya karakteristik dan tingkah laku politik partai. Perbedaan ini juga berimplikasi pada terjadinya keragaman interpretasi politik. Dalam pandangan NU, politik menjadibagian dari interpretasi keduniawian mereka terhadap agama. Tujuan-tujuan politik NU terdapat sepenuhnya dalam tujuan keagamaan. Cita-cita politik NU dapat dimengerti sebagai bagian dari cita-cita keagamaan Islam (Zamakhshyari Dhofier, 1990). Sedangkan kelompok MI melihat politik sebagai realitas yang tidak berhubungan dengan ideologi, massamaupun ikatan keagamaan yang menjadi landasan perjuangannya.

Dilihat dari aktualisasinya, konflik intern PPP terjadi karena perbedaan interpretasi atau persepsi politik dari unsur-unsur pendukung partai, khususnya NU dan MI. Dalam pandangan Nu, peran majelis Syuro sangat besar dan masih sangat dibutuhkan, karena berdasarkan pasal 19 anggaran dasar PPP tahun 1975 dinyatakan bahwa: "segala fatwa dan pertimbangan majelis syuro yang berdasarkan hukum agama adalah mengikat

partai". Penolakan partai terhadap RUU perkawinan, penetapan P4 dan aliran kepercayaan yang dimasukkan ke dalam GBHN merupakan sikap yang didasarkan pada referensi agama berdasarkan fatwa dan pertimbangan majelis syuro. Akan tetapi menurut MI, kewenangan struktur keagamaan yang sangat kuat dan dominan dalam partai hanya menjadi penghambat kearah perwujudan partai modern"

Perbedaan persepsi politik antara NU dan MI juga terjadi dalam kasus UU Pemilu. Dalam pandangan NU, pemilu merupakan hal yang prinsip. Penolakan NU terhadap UU pemilu didasarkan pada alasan bahwa undang-undang tersebut tidak mencerminkan aspirasi partai politik dan unsur-unsur pendukungnya serta tidak menjamin terlaksananya pemilu yang jujur, adil dan bersih. Disisi lain MI melihat masalah UU pemilu tidak lebih dari sekadar aturan permainan politik belaka. Penolakan NU terhadap UU pemilu pada tahun 1980 merupakan awal konflik yang kemudian berkepanjangan sejak berdirinya PPP. Konflik lain NU dan MI yang disebabkan perbedaan persepsi politik adalah dengan kasus Pertamina, petisi 50 pencalonan anggota DPR, dan penentuan jatah kursi pimpinan komisi DPR.

Konflik NU dan MI yang notabene adalah unsur PPP menjelang pemilu 1982, menunjukkan bahwa: pertama, apa yang difusikan dalam PPP tampaknya baru sebatas pada bidang politik dan belum meleburkan karakteristik unsur-unsurnya secara keseluruhan. Ada kerapuhan dalam tubuh PPP. Kerapuhan tersebut tidak hanya terlihat dari tidak adanya kesatuan dalam partai yang bernama persatuan tetapi juga ketidakberdayaan partai terhadap intervensi dari luar sebagaimana tercermin dalam kasus pemilihan pimpinan komisi di DPR. Dengan demikian ternyata fusi partai yang dalam bahasa mubtadi potret separuh badan membawa konsekuensi tertentu. Benih konflik merupakan bawaan dari unsur-unsur pembentuk partai, telah tertanam dalam diri PPP. Konflik tersebut cukup rumit dan kompleks sehingga tidak bisa diselesaikan dengan nilai agama yang menjadi asas partai. Kedua, PPP belum mempunyai mekanisme pengendali atau peredam konflik dan juga kepemimpinan yang kuat dan legitimatif. Ketiga, masing-masing unsur masih mementingkan diri sendiri dan belum memikirkan partai. Partai masih terlihat sebagai perkumpulan federatif daripada partai yang sesungguhnya. Hal ini mengakibatkan rendahnya intensitas dialog intern partai dan masih kuatnya gejala patron klien relation ship dalam mekanisme partai.

Perbedaan persepsi antara NU dan MI juga terjadi menjelang dan sesudah muktamar I PPP tahun 1984 serta menjelang muktamar II tahun 1989. Konflik berkisar pada masalah pelaksanaan muktamar, pembentukan kepanitiaan, penetapan utusan daerah formatur serta sistem pemilihan ketua umum. Meski setiap unsur telah berpengalaman mengadakan muktamar tetapi muktamar gabungan merupakan hal baru. Dasar perbedaan sesungguhnya tidak terletak pada persoalan teknis, melainkan pada kekhawatiran insur-unsur minoritas dalam partai jika muktamar dilaksanakan.

2. Menjadi Partai Berbendera Islam Setengah Tiang

Problem lain yang dihadapi PPP sejak kelahirannya adalah asas Islam yang masih disandanginya ketika penguasa orde baru berkeinginan mengakhiri ideologi-ideologi golongan. Dengan demikian fusi partai yang dilakukan pemerintah awal tahun 1973 pada dasarnya tidak hanya alam rangka penyederhanaan jumlah partai tetapi juga penyederhanaan ideologi. Pembertakuan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi masyarakat dan partai politik telah menciptakan keterasingan (alienasi) dan kegelisahan bagi PPP. Hal itu semakin mempertajam konflik yang telah ada sebelumnya.

Terjadi disorganisasi partai dengan berlakunya Pancasila sebagai asas partai. Indikasi yang memperlihatkan hal itu adalah terjadinya perbedaan pendapat tentang penggunaan atribut Islam dalam partai seperti lambang Ka'bah dan juga beberapa istilah Islam dalam AD/ART pasca asas tunggal. Elit partai tidak mampu menyelesaikan konflik tersebut, mereka cenderung menunggu campur tangan pemerintah dalam setiap momentum konflik intern partai. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan partai dalam menyelesaikan konflik intern. Segegap elit partai sesungguhnya sedang mencari bentuk yang tepat bagi keberadaan PPP pasca asas tunggal. Kegagalan partai dalam mencari identitas baru tampak sekali terlihat dalam persiapan kampanye menjelang pemilu 1987. Partai terlihat belum siap tentang apayang harus dijual dan bagaimana menjual PPP.

Konflik NU dan MI membawa implikasi besar terhadap PPP secara keseluruhan yaitu renggangnya hubungan elit partai dengan masa dimana asin-msing unsur berpijak. Komunikasi antara masa pendukung dan elit partai hanya berlangsung di sekitar pemilu. Pasca penetapan Pancasila sebagai satusatunya asas dan hilangnya atribut Islam dalam partai serta sikap pragmatis akomodatif dari elit partai membuat PPP kehilangan kepercayaan dari umat sekaligus kehilangan ruh sebagai partai Islam. Meminjam istilah Syamsuddin Haris, PPP pasca asas tunggal telah menjadi partai berbendera Islam setengah tiang.

Berkaitan dengan konflik internal partai, Chozin Chumaedy mengatakan bahwa: "konflik internal memang ada, seperti perebutan posisi dalam kepemimpinan terutama oleh kalangan NU dan MI. Keduanya merupakan basis kekuatan partai. Konflik juga disebabkan karena ada perebutan untuk mendapatkan jabatan-jabatan penting di luar partai seperti menjadi anggota DPR atau DPRD. Dengan demikian konflik lebih disebabkan oleh hal-hal yang pragmatis bukan hal-hal yang prinsipil atau ideologis. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam konflik adalah Idham Cholid (NU), Yusuf Yasin (NU), Imran Rosyadi (NU), Junaei Lubis (NU), Amin Iskandar (NU), Ismail Hasan Metareum (MI), H. Naro dan Bustaman (MI). (Chozin Chumaedy, 2006)

Adanya intervensi pemerintah dalam konflik internal partai diakui oleh Faisal Baasir. Faisal Baasir mengatakan:

"memang ada intervensi pemerintah dalam memblok-blok unsur NU dan MI. Pemerintah sudah memasang orang-orang yang memiliki kedekatan dengannya untuk menguasai partai. Dalam pemilihan ketua umum Parmusi, Naro dipaksakan masuk, padahal sejak awal Naro tidak ada, sehingga unsur masyumi dikikis habis. Setelah masuk PPP, Naro melakukan de-NU nisasi. Langkah Naro itulah yang kemudian memunculkan fraksi-fraksi atau sektarianisme dalam tubuh PPP" (Faisal Baasir, 2006).

Chozin Chumaedy menambahkan bahwa:

"intervensi negara terhadap PPP pada masa Orde Baru cukup besar. Beberapa langkah yang dilakukan negara dalam rangka itu: pertama, melakukan fusi partai untuk menjamin stabilitas dan mengendalikan partai. Kedua, memotong kepemimpinan dan struktur partai di tingkat cabang dan ranting dengan kebijakan floating mass. Ketiga, penghapusan simbol-simbol Islam akibat penerapan asas tunggal. Keempat, melemahkan peran ulama (khususnya yang dianggap radikal dan kritis terhadap pemerintah) dalam kepemimpinan partai, dengan memasukkan orang yang dianggap akomodatif terhadap pemerintah (Chozin Chumaedy, 2006)

Berdasarkan penjelasan di atas, konflik intern PPP sejak tahun berdirinya sampai menjelang muktamar 1989 memperlihatkan beberapa kecenderungan : pertama, konflik lebih bersumber pada kepentingan pribadi dan kelompok daripada kepentingan partai dan umat yang diwakilinya. Kedua, sumber konflik tidak berasal dari hal yang prinsip atau masalah yang penting. Ketiga, belum adanya mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Keempat, adanya campur tangan pemerintah dalam konflik intern partai. Campur tangan pemerintah kerap kali justru karena diundang oleh salah satu pihak yang terlibat konflik intern partai.

Adanya campur tangan pemerintah dalam berimplikasi pada proses rekrutmen pemimpin partai dan penentuan anggota legislatif dari partai. Aktifitas partai hanya terbatas dan berfokus pada masalah kepemimpinan dan bagaimana pengurus partai bisa menjadi anggota legislatif. Kedua jabatan tersebut selalu dipersebutkan oleh semua pihak dengan menggunakan semua cara dan tanpa memperhatikan faktor politik. Keadaan seperti itu akhirnya membuat beberapa orang menjadi oportunis dan siap berakomodasi dengan pihak yang dapat dijadikan patron yaitu militer dan pemerintah. Siapa yang bisa menjadi pemimpin partai dan anggota legislatif dari partai tidak lagi didasarkan pada masa aktif dan dukungan internal partai semata tetapi lebih banyak ditentukan oleh restu pemerintah.

Pola Konflik PPP dan Relasi Konfliknya Dengan Negara di Era Reformasi

Sejarah mencatat bahwa konflik PPP tidak hanya terjadi di era Orde Baru, tetapi juga di era reformasi. Konflik yang dialami PPP di era reformasi ini cukup parah. Keluarnya Zaenuddin MZ dan Ja'far Badjebber yang kemudian mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR), mundurnya Bachtiar Chamsyah dari tim formatur muktamar V, tidak diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Hamzah Haz dan pemecatan dr. Fauzi A.R sebagai ketua umum DPW PPP DIY adalah bukti tingginya eskalasi konflik PPP di era reformasi.

Lepasnya Zaenuddin MZ dan Berdirinya PBR

Konflik PPP di era reformasi berawal ketika Dewan Pimpinan Pusat memberhentikan enam pengurus pusat yang dinilai menyalahi kebijakan yang telah digariskan partai. Sejak rencana Silaturahmi Nasional (Silatnas) yang digagas Surya Dharma Ali, Bachtiar Chamsyah dan Zarkasih Noor muncul ke publik, sudah terdengar kabar akan ada sanksi bagi mereka yang dianggap tidak taat asas dan tidak mematuhi aturan main organisasi partai (DPP). Silatnas digagas oleh beberapa fungsionaris partai untuk mengevaluasi kinerja partai agar tidak ditinggalkan pendukungnya. Akan tetapi pengurus DPP PPP di bawah pimpinan Hamzah Haz menganggap bahwa Silatnas adalah upaya sekelompok anggota partai yang ingin mengganti kepemimpinan DPP di bawah Hamzah Haz.

Apa yang dilakukan DPP PPP di bawah pimpinan Hamzah Haz sesungguhnya menunjukkan bahwa partai belum dikelola secara profesional dan demokratis. Partai lebih banyak tampak sebagai organisasi pengurus yang elitis daripada organisasi yang hidup sebagai gerakan anggota partai. Tidak jarang partai menjadi representasi sang ketua umum. Elit partai seringkali melihat perbedaan pendapat sebagai hal yang tabu. Ketika terjadi perbedaan pendapat, terlebih yang ditengarai sudah menjurus pada konflik, maka pelakunya langsung dipecat. Pemecatan dianggap sebagai fenomena

biasa. Alasan yang seringkali digunakan adalah menentang kebijakan partai (baca DPP). DPP PPP di era reformasi memperlihatkan kecenderungan kearah otoriter dan sentralistis.

Konflik yang lebih parah dan mengakibatkan munculnya partai tandingan justru terjadi pasca Mukernas tahun 2000, yang hasilnya memutuskan Muktamar akan digelar tahun 2004 setelah pemilu. Perseteruan terjadi antara kubu Zaenuddin M.Z dan Jafar Badjeber melawan kubu Hamzah Haz dan fungsionaris DPP PPP. Para penggagas PPP reformasi di bawah komando Zaenuddin MZ menghendaki Muktamar diselenggarakan maksimal tahun 2002 sesuai keputusan Muktamar Luar Biasa tahun 2001. Tarik ulur yang tidak membuahkan hasil mengakibatkan membelotnya Zaenuddin MZ dan Ketua DPW PPP DKI Jafar Badjeber membelot. Keduanya kemudian mendirikan PPP Reformasi yang kemudian berganti nama menjadi PBR dengan Zaenuddin MZ sebagai ketua umumnya. Keluarnya Zaenuddin MZ dan Jafar Badjeber bukan hanya mengimbis ke daerah-daerah, melainkan juga menjadi simbol perpecahan PPP pasca Muktamar Ancol tahun 1989.

Keluarnya Zaenuddin MZ dan kawan-kawan yang kemudian mendirikan PBR sebagai tandingan sekaligus pesaing PPP adalah puncak konflik PPP di era reformasi. Berkaitan dengan fenomena ini, Chozin Chumaedy mengatakan :

"Saya termasuk orang yang menyangkan perpecahan ini. Memang di era reformasi ini terjadi refregmentasi umat, dimana para tokoh-tokoh politik umat beramai-ramai mendirikan partai. Seyogyanya setelah mengalami rekayasa dan tekanan serta masuk dalam era reformasi serba terbuka seperti sekarang ini mereka memperkuat PPP sebagai wadahnya. Keluarnya Zaenuddin MZ sebenarnya merupakan bentuk kekecewaan yang tidak begitu signifikan. Tidak puas lantas mendirikan partai baru. Persoalan mendasar yang muncul dipermukaan adalah karena mundurnya jadwal muktamar. Padahal mundurnya jadwal muktamar adalah hasil musyawarah, karena pada saat itu PPP akan menghadapi pemilu maka perlu persiapan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada hal yang prinsipil. Boleh dibalang ketika memasuki era reformasi ini memang terjadi liberalisasi politik, jadi orang gampang mendirikan partai... (Chozin Chumaedy, 2006)

Menurut Ketua DPP PBR Fauzi, latar belakang munculnya PBR disebabkan karena ada kedzoliman yaitu ada orang yang tidak tunduk kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. Kaum reformis dalam tubuh DPP PPP dan beberapa DPW serta DPC meminta muktamar dipercepat, tetapi DPP tidak merespon dengan alasan hal tersebut hanya diminta oleh beberapa DPW dan DPC. Mengapa muktamar tidak dilaksanakan pada waktu yang semestinya, jelas ada kepentingan. Muktamar harusnya bisa dilaksanakan pada waktu itu, terlebih lagi kondisi sosial masyarakat menghendaki terjadinya regenerasi dalam tubuh partai. Hampir setengah DPW dan DPC mendukung serta menghendaki adanya regenerasi. Tetapi Hamzah Haz tidak merespon, dan hal itu menimbulkan kekecewaan tokoh-tokoh reformis PPP. Pada awalnya kaum reformis hanya ingin melakukan reformasi internal partai dalam rangka kaderisasi. PPP adalah amanah dan DPP harus melaksanakan muktamar sebelum pemilu 2004 tepatnya tahun 2002, tetapi tidak adanya respon dari DPP membuat beberapa tokoh yang dimotori Zaenuddin MZ, Ja'far Badjeber dan Zaenal Ma'arif merasa patah semangat berpartai dalam PPP. Mereka kemudian berinisiatif mendirikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi. Tetapi karena ada undang-undang yang melarang nama partai yang sama, maka kemudian diubah menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR). Hampir semua orang PPP yang memiliki semangat keislaman dan reformasi semuanya keluar dari PPP dan bergabung dengan PBR..

Menanggapi konflik PPP di era reformasi, Faisal Baasir mengatakan bahwa konflik PPP di era reformasi yang menyebabkan Zaenuddin MZ keluar dan kemudian mendirikan PBR adalah bukan konflik internal partai. Konflik tersebut lebih disebabkan karena kepentingan pribadi untuk menduduki jabatan sehingga mendirikan partai politik. Dan itu sah-sah saja. Jadi dalam konflik PPP di era reformasi tidak ada intervensi negara, yang ada hanyalah kepentingan pribadi. Sedangkan Eggy Sudjana mengatakan:

"Materi konflik PPP di era reformasi hanyalah persoalan teknis, yakni berkaitan dengan bagaimana mengelola partai dengan baik. Zaenuddin MZ harus dihargai keinginannya, ia menginginkan muktamar segera dilaksanakan karena banyak persoalan yang harus segera diselesaikan disamping ada hasrat kepentingan, yaitu ingin menggantikan Hamzah Haz. Akhirnya konflik terjadi dan ia keluar dari PPP dan mendeklarasikan PPP reformasi yang kemudian menjadi PBR. Sayangnya pak Hamzah Haz tidak mempunyai inisiatif untuk melakukan konsolidasi internal, tetapi justru membiarkan semuanya terjadi sehingga terjadilah konflik." (Eggy Sudjana, 2006)

2. Implikasi Konflik, Tantangan dan Masa Depan PPP

Menurut Eggy Sudjana implikasi konflik internal PPP adalah Menurunnya suara PPP dari 25 juta suara pada pemilu 1999 menjadi 10 juta suara pada pemilu 2004. Secara politis institusi partai menjadi lemah dan secara sosiologis kepercayaan masyarakat terhadap partai menurun. Harus diakui pengelolaan institusi partai memang tidak bagus. Menurut saya pengurus partai harus diberi sanksi moral jika melanggar atau terjadi sesuatu yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap partai. Sanksi moral dapat berupa larangan menjabat dalam kepengurusan partai.

Berkaitan dengan perkembangan PPP ke depan, Eggy menyarankan agar: *Pertama*, partai harus dipimpin oleh orang yang berkualitas, memahami partai dan juga memahami negara. *Kedua*, partai harus mempertegas garis ideologinya, yaitu Islam. *Ketiga*, secara administrasi partai, harus ada standar keberhasilan dan kegagalan partai. *Keempat*, harus ada sinergi antar golongan agar konflik partai tidak terjadi lagi. *Kelima*, kepentingan pragmatis sesaat harus dikikis habis dalam kader partai."

PPP perlu mencermati beberapa isu strategis, antara lain : *Pertama*, dampak dari sistem multi partai, juga perubahan sistem pemilu legislatif, dan kepala negara dan juga daerah. *Kedua*, penegakkan hukum dan moralitas. Elit dan kader partai harus berdiri di garda depan dalam pemberantasan KKN dan moralitas. kader partai harus dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Partai harus memberikan sanksi yang jelas dan tegas kepada kader yang terbukti melakukan KKN. *Ketiga*, partai perlu mencermati kebijakan pengurangan subsidi dan menggali potensi daerah karena kesenjangan antar daerah masih terjadi. *Keempat*, tanggungjawab secara moral terhadap persatuan umat. *Kelima*, merumuskan alternatif strategi penanganan utang luar negeri (hadimulyo, 2006).

Selain itu, PPP juga perlu melakukan konsolidasi dari bawah. Sebagai bagian dari konsolidasi organisasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka kaderisasi menjadi mutlak untuk dioptimalkan. PPP harus mempunyai kemampuan membuka diri terhadap masuknya kader-kader baru dengan asal usul dan keahlian yang beragam. Partai perlu mengembangkan potensi para kader dan juga meningkatkan manajemen dan strategi komunikasi politik serta mekanisme penyelesaian konflik yang efektif. Keberadaan

beberapa organisasi sayap (ulama, perempuan dan pemuda) perlu dikembangkan dengan baik. Perlu disosialisasikan paradigma baru partai hasil Mukernas tahun 2000 agar tumbuh budaya politik baru di lingkungan partai.

Analisa Pola Konflik PPP dan Relasi Konfliknya Dengan Negara di Era Orde baru dan Reformasi

Berkaitan dengan bentuk konflik PPP di era Orde Baru dan reformasi, Chozin Chumaedy menjelaskan :

" Jika di era Orde Baru konflik PPP disebabkan oleh konflik antar faksi-faksi yang ada, yang paling dominan adalah antara NU dan MI, ditambah dengan intervensi pemerintah, maka di era reformasi tidak seperti itu. Konflik PPP di era reformasi bukan lagi disebabkan oleh konflik antar faksi tetapi sama-sama karena pragmatisme kepentingan dalam rangka meraih jabatan-jabatan politik. Bagaimana bisa dikatakan konflik antar faksi, kalau pak Hamzah Haz dan Zaenuddin MZ adalah sama-sama dari NU. Demikian juga ada yang konflik padahal sama-sama dari MI. Jadi di era reformasi ini agak susah dipetakan. Dengan kata lain, konflik lebih sering muncul karena faktor ketidakpuasan saja. Mungkin kalau di partai baru-PBR- ia bisa berkuasa dan juga bisa menempatkan orang-orangnya di DPR atau menjadi menteri. Sedangkan kalau tetap di PPP dia harus antri dan menunggu." (Chozin Chumaedy, 2006) Dilihat dari faktor penyebabnya, terdapat perbedaan konflik PPP di era Orde Baru dan reformasi. Konflik PPP di era Orde Baru lebih banyak disebabkan karena intervensi negara, sedangkan di era reformasi menunjukkan persainagn elit partai dan belum adanya kedewasaan berpolitik para aktor politik lebih relevan untuk dijadikan faktor penyebab konflik PPP. Perbedaan juga mencakup bentuk, sifat, materi dan upaya penyelesaian konfliknya. Bentuk konflik PPP di era Orde Baru lebih merupakan perseteruan kekuasaan antar faksi yang ada di dalam partai, terutama antara NU dan MI. Sedangkan di era reformasi bentuk konfliknya merupakan perebutan kekuasaan antar elit partai antar generasi tua dan muda. Adapun sifat konflik PPP di era Orde Baru adalah benturan kekuasaan antar golongan sedangkan di era reformasi sifat konfliknya adalah pragmatisme individu untuk mendapatkan kekuasaan. Materi konflik PPP di era Orde baru ada prinsipkareana sudah menyangkut ideologi partai, yaitu ketika negara menetapkan asas pancasila sebagai satu-satunya asas bagi seluruh ormas dan partai politik. Tetapi da juga yang tidak prinsipil, yaitu berkaitan dengan perebutan kekuasaan, misalnya politik diskriminasi Naro terhadap NU dan keluarnya NU dari PPP. Sedangkan materi konflik di era reformasi tidak berkaitan dengan masalah prinsip, tetapi berkaitan dengan masalah teknis, ketidakpuasan terhadap kinerja partai. Implikasi konflik adalah penurunan tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai, sebagaimana terlihat dalam pemilu legislatif 2004 dan pemilu presiden/wakil presiden 2004. Pada era Orde Baru, jalan keluar yang ditempuh oleh NU karena merasa diperlakukan tidak adil oleh Naro hanyalah menarik diri dari PPP dan kembali menjadi ormas. Melakukan penggembosan terhadap PPP dan membebaskan warganya untuk memilih partai. Peluang mendirikan partai baru tidak dimungkinkan secara yuridis formal pada masa itu. Berbeda dengan era reformasi. Ketidakpuasan terhadap kinerja partai bisa diwujudkan dengan keluar dari partai dan kemudian membentuk partai baru yang menjadi saingan dan tandingan partai sebelumnya. Terlihat, baik di era Orde Baru maupun reformasi, partai tidak mempunyai mekanisme penyelesaian konflik secara efektif. Konflik dibiarkan terjadi dan kemudian yang terlibat konflik juga dibiarkan mencari jalan keluarnya sendiri.

Selain perbedaan pola konflik, terdapat juga perbedaan relasi konflik PPP dengan negara di era orde baru dan reformasi. Campur negara dalam konflik PPP di era Orde Baru sangat besar. Negara berkepentingan melemahkan partai karena partai dianggap sebagai biang konflik dan instabilitas politik. Intervensi negara dilakukan mulai dengan politik penyederhanaan jumlah partai dan juga melalui operasi intelijen yakni dengan memasukkan orang-orang menjelang pemilu. Masuknya Naro dan Ismail Hasan Metareum dapat menjadi bukti akan hal ini. Mereka dimasukkan ke dalam partai dengan maksud untuk menggeser tokoh-tokoh partai yang dianggap radikal dan tidak akomodatif terhadap pemerintah. Untuk melemahkan partai, negara juga membuat aturan main yang melarang partai mempunyai struktur di tingkat cabang dan ranting. Kebijakan yang lebih dikenal dengan *floating mass*. Ideologi Pancasila juga merupakan upaya melemahkan partai. Kebijakan asas tunggal jelas merugikan PPP, karena membuat PPP kehilangan jati diri dan identitasnya sebagai partai Islam

Campur tangan negara yang sangat dalam terhadap partai di era Orde Baru membuat partai menjadi sangat tergantung kepada negara. Partai menjadi tidak percaya diri dan tidak bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Tidak jarang, campur tangan negara seringkali justru diminta oleh elit partai. Campur tangan negara tertuju pada penentuan ketua umum dan anggota legislatif dari partai. Restu negara menjadi penentu siapa yang akan menjadi ketua umum dan siapa yang akan menjadi anggota legislatif dari partai. Negara tampaknya melihat partai hanya dari pemimpinnya. Jika pemimpinnya sudah dipegang maka partai tersebut akan mudah dikendalikan. Jadi tidak mengherankan, jika banyak elit partai yang mendekati kepada negara agar bisa menduduki jabatan tersebut, meski harus menggunakan semua cara dan melanggar etika politik. Asas dan ideologi partai tidak mempunyai pengaruh sedikitpun terhadap perilaku politik elit partai. Aktifitas partai ada dan marak hanya ketika menjelang mukamar dan pemilu. Setelah itu, partai seakan tidak melakukan apa-apa sampai muktamar dan pemilu tiba.

Sementara di era reformasi, posisi Negara sangat lemah. Negara mengalami delegitimasi yang sangat parah. Lengsernya Soeharto ternyata dibarengi dengan turunnya wibawa seluruh institusi negara di satu sisi dan penguatan institusi rakyat-termasuk partai-di sisi lain. Dengan keadaan seperti itu, tidak memungkinkan negara melakukan intervensi terhadap partai, karena negara juga tidak mampu mengatur dirinya sendiri. Di era kebebasan politik ini, peran partai politik sangat dominan dan merupakan satu-satunya institusi politik yang konstitusional dalam pemilu. Partai politik mempunyai kewenangan yang luas untuk mengatur urusannya sendiri dan menentukan kebijakannya. Partai politik di era ini menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah melalui wakil-wakilnya di parlemen. Hal yang ironis, Era keterbukaan dan kemandirian ternyata justru membuat ego elit partai menjadi sangat tinggi. Tidak puas dengan kinerja partai lantas membuat jalan pintas dengan membentuk partai baru yang menjadi saingan dan tandingan partai sebelumnya. Secara politik, pembentukan partai baru jelas hanya akan memperlemah partai lama, meski bisa jadi menguntungkan pelakunya. Secara yuridis formal memang dimungkinkan di era reformasi ini. Hal yang terlihat sama dan tidak mengalami perubahan dari fenomena konflik PPP di era Orde Baru dan reformasi adalah selain partai belum mempunyai mekanisme pengendalian serta penyelesaian konflik secara efektif adalah juga belum adanya kedewasaan berpolitik dari para elit partai. Elit partai partai mengedepankan ego dan ambisi politiknya untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Barangkali mereka lupa, bahwa era reformasi ternyata membuat motif perilaku politik mereka menjadi sangat telanjang. Jika di era Orde Baru, negara masih bisa menjadi kambing hitam dari berbagai konflik yang dialami

partai, maka di era reformasi alasan tersebut tidak lagi mempunyai pijakan yang kuat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan berdasarkan data yang berasal dari dokumentasi maupun wawancara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konflik PPP di era Orde Baru lebih banyak merupakan konflik antar faksi dalam rangka untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, utamanya antara NU dan MI. Konflik disebabkan karena adanya perbedaan persepsi politik antara kedua unsur tersebut dalam mensikapi kebijakan pemerintah atau fenomena politik. Sumber konflik berasal dari faktor ideologi, kelangkaan posisi dan sumber serta alienasi politik. Adapun sifat konfliknya ada yang semi prinsipil tetapi lebih banyak tidak prinsipil. Sementara di era reformasi, konfliknya bukan antar faksi melainkan antar individu elit partai dalam rangka memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Ego elit partai sangat tinggi. Sumber konflik lebih banyak berasal dari faktor kelangkaan posisi dan sumber serta alienasi politik. Tidak ada pengaruh faktor ideologi. Adapun sifat konfliknya sama sekali tidak prinsipil. Hal yang sama-sama terjadi baik di era Orde Baru maupun reformasi adalah PPP tidak mempunyai mekanisme baku dan efektif dalam menyelesaikan konflik. Tetapi hal yang berbeda adalah cara yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik. Jika di era Orde Baru, NU hanya bisa menarik diri dari PPP dan tidak bisa menjadi partai saingan, maka di era reformasi, Zaenuddin MZ bisa membentuk PBR yang menjadi saingan bagi PPP.
2. Campur tangan negara dalam konflik PPP di era Orde Baru sangat besar dan dilakukan mulai dengan membuat kebijakan penyederhanaan partai, penetapan asas tunggal Pancasila, floating mass, dan operasi intelijen dengan menempatkan orang-orangnya dalam tubuh partai. Orde Baru memandang partai sebagai sumber instabilitas politik, sehingga harus ditundukkan baik secara ideologis maupun kepemimpinannya. Kebijakan Orde Baru tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi. Sementara di era reformasi, campur tangan hampir dalam konflik partai hampir tidak ada. Negara di era reformasi mengalami krisis legitimasi yang membuat dirinya tidak memungkinkan untuk melakukan intervensi pada institusi partai. Sebaliknya, era reformasi memberi kewenangan besar kepada partai untuk mengelola dan menentukan arah kebijakannya sehingga negara tidak bisa lagi dijadikan sebagai "kambing hitam" dalam konflik partai. Intensitas konflik PPP yang tinggi di era reformasi menunjukkan bahwa elit partai belum mempunyai kedewasaan dalam berpolitik. Ego dan ambisi politik pribadi untuk kepentingan jangka pendek adalah bukti belum adanya kedewasaan itu.

SARAN-SARAN

1. Secara khusus berkaitan dengan seringnya konflik, PPP perlu melakukan pelembagaan demokrasi prosedural dalam tubuh partai dan peningkatan penghayatan akan ideologi partai sebagai bagian dari ruh perjuangan politik. Termasuk di dalamnya pengaturan tentang mekanisme penyelesaian konflik partai secara efektif

partai, maka di era reformasi alasan tersebut tidak lagi mempunyai pijakan yang kuat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian secara keseluruhan berdasarkan data yang berasal dari dokumentasi maupun wawancara dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konflik PPP di era Orde Baru lebih banyak merupakan konflik antar faksi dalam rangka untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan, utamanya antara NU dan MI. Konflik disebabkan karena adanya perbedaan persepsi politik antara kedua unsur tersebut dalam mensikapi kebijakan pemerintah atau fenomena politik. Sumber konflik berasal dari faktor ideologi, kelangkaan posisi dan sumber serta alienasi politik. Adapun sifat konfliknya ada yang semi prinsipil tetapi lebih banyak tidak prinsipil. Sementara di era reformasi, konfliknya bukan antar faksi melainkan antar individu elit partai dalam rangka memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Ego elit partai sangat tinggi. Sumber konflik lebih banyak berasal dari faktor kelangkaan posisi dan sumber serta alienasi politik. Tidak ada pengaruh faktor ideologi. Adapun sifat konfliknya sama sekali tidak prinsipil. Hal yang sama-sama terjadi baik di era Orde Baru maupun reformasi adalah PPP tidak mempunyai mekanisme baku dan efektif dalam menyelesaikan konflik. Tetapi hal yang berbeda adalah cara yang digunakan oleh pihak yang terlibat dalam menyelesaikan konflik. Jika di era Orde Baru, NU hanya bisa menarik diri dari PPP dan tidak bisa menjadi partai saingan, maka di era reformasi, Zaenuddin MZ bisa membentuk PBR yang menjadi saingan bagi PPP.
2. Campur tangan negara dalam konflik PPP di era Orde Baru sangat besar dan dilakukan mulai dengan membuat kebijakan penyederhanaan partai, penetapan asas tunggal Pancasila, floating mass, dan operasi intelijen dengan menempatkan orang-orangnya dalam tubuh partai. Orde Baru memandang partai sebagai sumber instabilitas politik, sehingga harus ditundukkan baik secara ideologis maupun kepemimpinannya. Kebijakan Orde Baru tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaga kelangsungan pembangunan ekonomi. Sementara di era reformasi, campur tangan hampir dalam konflik partai hampir tidak ada. Negara di era reformasi mengalami krisis legitimasi yang membuat dirinya tidak memungkinkan untuk melakukan intervensi pada institusi partai. Sebaliknya, era reformasi memberi kewenangan besar kepada partai untuk mengelola dan menentukan arah kebijakannya sehingga negara tidak bisa lagi dijadikan sebagai "kambing hitam" dalam konflik partai. Intensitas konflik PPP yang tinggi di era reformasi menunjukkan bahwa elit partai belum mempunyai kedewasaan dalam berpolitik. Ego dan ambisi politik pribadi untuk kepentingan jangka pendek adalah bukti belum adanya kedewasaan itu.

SARAN-SARAN

1. Secara khusus berkaitan dengan seringnya konflik, PPP perlu melakukan pelembagaan demokrasi prosedural dalam tubuh partai dan peningkatan penghayatan akan ideologi partai sebagai bagian dari ruh perjuangan politik. Termasuk di dalamnya pengaturan tentang mekanisme penyelesaian konflik partai secara efektif

2. Secara umum berkaitan dengan upaya meningkatkan kepercayaan rakyat, PPP perlu menjalankan fungsi esensialnya sebagai partai politik, yaitu pendidikan politik, komunikasi politik, rekrutmen politik, agregasi dan artikulasi kepentingan rakyat dan aktif menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Untuk itu PPP perlu menyusun platform dan program riil yang berpihak pada rakyat
3. PPP memerlukan pemimpin yang mampu menterjemahkan visi dan misi partai termasuk pandangannya berkaitan dengan program sampai pembagian kerja dalam struktur partai dari mulai tingkat atas sampai bawah

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1978
 _____, *Ulama, Umat Islam dan Pemilu*, Gramedia, Jakarta, 1988
 _____, *Masa Depan Kehidupan Politik Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1988
 Amal, Ichlasul, (ed.), *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1998
 Ali, Fachri, Iqbal Abdurrauf Saimina, *Merosotnya Aliran dalam Partai Persatuan Pembangunan*, Prisma, LP3Es, Jakarta, 1981
 Amir, Zaenal Abidin, *Peta Islam Politik Pasca Soeharto*, Jakarta, LP3ES, 2003
 Baasir, Faisal, *Etika Politik : Pandangan Seorang Politisi Muslim*, Sinar harapan, Jakarta, 2003
 _____, *Quo Vadis Indonesia Pasca Krisis*, Sinar Harapan, Jakarta, 2005
 _____, *Indonesia Pasca Krisis*, Sinar harapan, Jakarta, 2004
 Budiarto, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992
 _____, (ed.), *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1981
 C. Plano, Jack Robert E. Riggs, et.al., *Kamus Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta, 1989
 Durverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Rajawali, Jakarta, 1982
 _____, *Partai-partai Politik dan Kelompok-Kelompok Kepentingan*, Bina Aksara, Jakarta, 1981
 Effendy, Sofyan, Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1984
 Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998
 Eldridge, Albert F., *Images of Conflict*, New York, Saint Martin Press, 1979
 Fatah, Eep Syaefullah, *Catatan Atas Gagalnya Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998
 Feith, Herbert, *the Decline of the Constitutional Democracy in Indonesia*, Ithaca, New York, Cornell University Press, 1962
 Gaffar, Afan, *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
 Geertz, Clifford, *the Religion of Java*, New York, the Free Press of Glencoe, 1960
 Gani, Soelistiyati Ismail, *Pengantar Ilmu Politik*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1984
 Gitosudarmo, Indriyo, *Perilaku Keorganisasian*, BPFE, Yogyakarta, 2000
 Haricahyono, Cheppy, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991
 Harahap, Abdul Asri, *PPP : Sintesa Nasionalisme dan Religiusitas*, Yogyakarta, Dinamika Press, 2004
 Haris, Syamsuddin, *PPP dan Politik Orde Baru*, Grasindo, Jakarta, 1991
 Hidayat, Komaruddin, M. Yudhie Hartono, *Manuver Politik Ulama : Tafsir Kepemimpinan Islam dan Dialektika Ulama-Negara*, Jalasutra, Yogyakarta, 2004
 Imawan, Riswanda, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997
 Jaenuri, Achmad, *Orientasi Ideologi Gerakan Islam : Konservatisme, Fundamentalisme,*

- Sekulerisme dan Modernisme*, LPAM, Surabaya, 2004
- Jihan, Abu, *PPP : Gejolak di Perjalanan, Sebuah Pengantar*, Jakarta, Integritas Press, 1984
- Karim, M. Rusli, *Negara dan Peminggiran Islam Politik*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999
- _____, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991
- Kantaprawira, Rusadi, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1998
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung, 1997
- Liddle, William, *Indonesia in 1986 : Contending with Scarcity*, dalam Asian Survey, Volume 27, Nomor 2, Februari 1987
- _____, *Indonesia 1977 : The New Orde's Second Parliamentary Election*, dalam Asian Survey, Volume 18, Nomor 2, Februari 1978
- Maliki, Zaenuddin, *Penaklukan Negara Atas rakyat*, UGM Press, Yogyakarta, 1999
- Marbun, B N, *Kamus Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- Miftah, Agus, *PPP : Persaingan NU dan MI , Refleksi Menjelang Suksesi*, Forum Kajian Masalah Sosial Politik, Jakarta, 1994
- Mulkan, Abdul Munir, *Perubahan Perilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987 : Dalam Perspektif Sosiologis*, Rajawali, Jakarta, 1988
- Nawari, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1987
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia : 1900-1942*, LP3ES, Jakarta, 1994
- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional*, Grafity Press, Jakarta, 1987
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Ghalia, Jakarta, 1988
- Radi, Umairi, *Strategi PPP 1973-1982 : Studi Tentang Kekuatan Politik Islam Tingkat Nasional*, Integritas Press, Jakarta, 1982
- Ratnawati, *Handout Mata Kuliah Partai Politik*, IP fisipol UMY, 2006
- Ridwan, *Paradigma Politik NU : Relasi Sunni-Nu dalam Pemikiran Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta, 1982
- Soekanto, Soeryono, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, 1995
- Suswanta, *Keberanian Untuk Takut : Keterlibatan Tiga Tokoh Masyumi Dalam PRRI*, Avyrouz, Yogyakarta, 2000
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, GIP, Jakarta, 1996
- Toha, Miftah, *Kepemimpinan dalam Manajemen : Suatu Pendekatan Perilaku*, Grafindo, Jakarta, 1995
- Zikri, Afdal, *Pola Konflik PPP di era Reformasi : Studi di DPW DIY*, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UMY, 2005
- Koran, Tabloid dan Majalah :
Forum Keadilan, Suara Islam, Sabili, Kompas, Republika, dan Jawa Pos

Wawancara :

1. Chozin Chumaedy : Fungsiaris PPP tahun 1977-2005, Wakil Sekretaris Umum DPP PPP
2. Fauzi : Ketua DPP PBR
3. Ja'far Badjeber : Mantan Ketua DPW PPP DKI Jakarta 1999-2002, Mantan Sekretaris Jenderal DPP PBR masa kepemimpinan Zaenuddin MZ
4. Faisal Baasir : Mantan Ketua DPP PPP, Mantan Ketua Parmusi, Mantan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
5. Umar Sanusi : Ketua DPW PPP DIY
6. Syamsul Arifin : Ketua DPW PBR DIY
7. Eggy Sudjana : Majelis Pakar PPP